

AKAR MASALAH KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH. *)

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai suatu sosok masyarakat yang pluralistik yang memiliki banyak kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. Pada suatu sisi pluralistik dalam bangsa Indonesia bisa menjadi positif dan konstruktif tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang negative dan destruktif yang dapat berakibat pada disintegrasi bangsa. Kenyataannya sejarah masyarakat adalah *multi-complex* yang mengandung *religious pluralism*. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya *religious pluralism* dalam masyarakat Indonesia, yang mengutamakan toleransi dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Pluralisme, Agama, Toleransi

Abstract

Indonesia is known as a figure of a pluralistic society that has a lot of diversity and diversity in terms of religion, tradition, art, culture, way of life and view of the values shared by ethnic groups in Indonesian society. On one side in the pluralistic Indonesian nation can be positive and constructive, but on the other hand could also be a negative and destructive force that can lead to national disintegration. In fact the history of society is a multi-complex containing religious pluralism. This is the reality, because it inevitably we have to adjust, to recognize the religious pluralism in Indonesian society, that promotes tolerance in various dimensions of national life.

Keywords: Pluralism, Religion, Tolerance

1. PENDAHULUAN

Setiap terjadi konflik yang bernuansa “SARA” (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), pemerintah dan aparat tidak pernah berusaha mencari akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan memecahkannya. Semua berkonsentrasi menghentikan konflik dan mencari pelaku yang memicu terjadinya konflik dan menghukumnya pelakunya. Konsekuensinya, timbul persepsi di masyarakat bahwa aparat selalu melindungi kelompok minoritas yang dijadikan sasaran amuk massa.¹

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada sa-

*) Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

¹ Membedah Akar Masalah Konflik “SARA” di Tanjung Balai Sumatera Utara, http://www.kompasiana.com/mustunumar/membedah-akar-masalah-konflik-sara-di-tanjung-balai-sumatera-utara_579e716ed47a61b11ffef310.

tupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan. Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan.²

Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.³

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.⁴ Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁵

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.⁶

Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan

dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.⁷

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Indonesia dikenal sebagai suatu sosok masyarakat yang pluralistik yang memiliki banyak kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia.⁸ Pada suatu sisi pluralistik dalam bangsa Indonesia bisa menjadi positif dan konstruktif tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang negative dan destruktif yang dapat berakibat pada disintegrasi bangsa. Kenyataannya sejarah masyarakat adalah *multi-complex* yang mengandung *religious pluralism*. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya re-

² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 345.

³ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm 156.

⁴ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 587.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 99.

⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 68.

⁷ Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1994, hlm 53.

⁸ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1999, hlm. 193

religious pluralism dalam masyarakat Indonesia.⁹

Dewasa ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik di antara mereka. Konflik antar-umat beragama yang terjadi di tanah air semakin memprihatinkan. Bahkan dengan adanya konflik-konflik baru akan bisa merambah ke daerah lain kalau masyarakat mudah menerima isu dan terprovokasi.¹⁰ Yang paling aktual adalah konflik antarumat beragama di Tanjung Balai Sumatera Utara.

Masyarakat Indonesia di hampir semua suku, agama, etnik dan golongan serta daerah, bagaikan ilalang kering yang sangat mudah terbakar atau dibakar. Sangat sulit diterima oleh akal sehat seorang ibu keturunan etnik Tionghoa (Cina) yang datang ke Masjid untuk memprotes karena kumandang azan mengganggu yang bersangkutan, kemudian masyarakat Muslim di sekitar itu marah dan membakar puluhan Vihara dan Klenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut analisa penulis, tidak mungkin terjadi konflik "SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang begitu hebat di Tanjung Balai, Sumatera Utara, jika tidak ada prolog yang membuat masyarakat Islam tidak suka, benci, anti dan marah terhadap etnik Tionghoa (Cina).

Di dalam konflik antaragama itu sendiri muncul tindakan yang justru bertentangan dengan ajaran agama, dikarenakan emosi yang tidak dapat terkendali sehingga dengan mudahnya mereka bertindak anarki di luar ajaran agama. Jika dikaitkan antara ajaran agama dan tingkah laku umat yang membakar tempat ibadah dan membunuh sesama umat sungguh sangat kontroversial. Padahal semua agama mengajarkan betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian. Kalau pun terjadi konflik antarumat beragama, maka bukanlah ajaran agamanya yang salah namun umat itu sendirilah yang sempit dalam memahami ajaran agama.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, masyarakat Indonesia di hampir

semua suku, agama, etnik dan golongan serta daerah, bagaikan ilalang kering yang sangat mudah terbakar atau dibakar. Terkait dengan hal itu, maka permasalahan yang perlu diajukan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia ?
2. Bagaimana penanggulangan konflik antar umat beragama di Indonesia?

III. KERANGKA TEORI

Bangsa Indonesia, memiliki kehidupan beragama yang sangat majemuk, maka untuk menghindari pertentangan dan konflik antar umat beragama telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang melandasi pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa, sasaran bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ternyata arahnya masih memiliki kendala berupa tantangan yang harus dihadapi antara lain;

- Belum optimalnya pendayagunaan potensi berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan keagamaan dalam masyarakat.
- Masih perlu ditingkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan pengetahuan agama dan keagamaan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
- Masih terdapatnya kesulitan dalam membina para penganut aliran kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa agar tidak bersifat tertutup.
- Kekurangmampuan masyarakat untuk lebih memahami, mendalami, dan menghayati, serta mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama.

Tantangan tersebut harus dihadapi bersama antar pemeluk agama agar terciptanya kerukunan umat beragama, sehingga dapat saling menghormati. karena itu untuk mengatasi dan menghindari konflik terutama yang berhubungan dengan kesenjangan ekonomi, perbedaan kepentingan, perbedaan suku-bangsa atau perbedaan ras, sehingga dari perbedaan yang ada di antara umat beragama dapat diatasi dengan

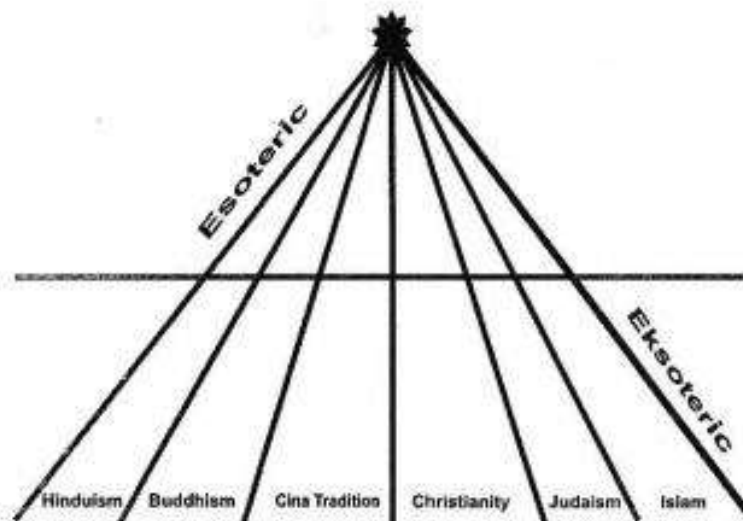
⁹ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan)*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm. 11

¹⁰ Hamdan Daulay, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, Lesti, Yogyakarta, 2001, hlm. 137

adanya dialog yang senantiasa dilakukan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama.

Frithjof Schuon, Pengusung ide "Kesatuan Transenden Agama-agama", adalah salah satu teori besar dalam wacana Pluralisme Agama. Ia seorang cendekiawan berkebangsaan Jerman yang oleh Seyyed Hossein Nasr dianggap sebagai orang yang paling otoritatif dalam masalah ini. Dengan teorinya itu Schuon yang kelahiran Basel, Swiss, tanggal 18 Juni 1907 ini berkeyakinan bahwa sekalipun pada tataran luarnya agama berbeda-beda, namun pada hakikatnya semua agama adalah sama. Dengan kata lain, kesatuan agama-agama itu terjadi pada level transenden.

Bagi Frithjof Schuon, dalam bukunya "*Mencari Titik Temu Agama-agama*", penerjemah Saafroedin Bahar.¹¹ Menyatakan bahwa hidup ini ada tingkatan-tingkatannya. Dari segi metafisik, hanya pada Tuhanlah, yang berada ditingkat tertinggi, terdapat titik temu berbagai agama. Sedangkan pada tingkatan bawahnya, agama-agama tadi saling berbeda. Dari segi epistemologis dapat pula dikatakan bahwa perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain juga mengecil dan menyatu ditingkat tertinggi, sedangkan ditingkat bawahnya berbagai agama terpecah-belah.¹²



Gambar 1 : Kesatuan transeden agama-agama

Dalam versi Schuon, perbedaan antara hakikat dan perwujudan dilakukan dalam dua cara, yaitu esoteris dan eksoteris. Schuon menarik garis pemisah antara yang esoteris dan eksoteris. Harus dipahami garis pemisah tersebut bersifat horizontal dan hanya ditarik satu kali membelah berbagai agama yang ditemui sepanjang sejarah. Dan di atas garis tersebut terletak paham *eksoteris*. Karena pada dasarnya semua agama pada hakikatnya adalah sama (*esoteris*) dan hanya berbeda dalam bentuknya saja (*ekso-*

teris).¹²

Keyakinan Schuon diatas berangkat dari pandangannya bahwa semua agama mempunyai dua realitas atau hakikat, yaitu *eksoteris* dan *esoteris*. Hakikat *eksoteris* adalah hakikat lahir, dimana pada level ini semua agama memiliki

¹¹ Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-agama*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 12

¹² Pemetaan yang dilakukan oleh Schuon ini terbilang menarik untuk dijadikan suatu pola atau metode dalam melihat sisi universal dari agama-agama. Ketika Schuon membahas kesatuan agama terletak pada aspek *esoteric-transcendent unity* dan perbedaan *particular-eksoteric*, telah memberi ruang bagi umat beragama dalam membangun relasi yang inklusif-dialogis. Lihat, Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-agama*, Ibid, hlm 11

dogma, hukum, ritual dan keyakinan yang berbeda-beda, dan bahkan saling bertentangan. Sementara hakikat *esoteris* adalah hakikat batin, dimana semua agama dengan segala perbedaan dan pertentangannya tadi bertemu. Di sinilah terletak titik temu agama-agama itu. Jadi level *eksoteris* bagaikan 'badan' agama sementara level *esoteris* adalah "hati" dari agama. Level *eksoteris* berbeda-beda, namun level *esoteris* adalah sama. Karena itulah Schuon menyebut teorinya ini dengan "*the transcendent unity of religions*" (kesatuan transenden agama-agama).

IV. PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia

Terjadinya konflik tidak terlepas dari adanya dalang atau provokatornya tidak pernah diusut tuntas. Sehingga wajar jika masyarakat menuntut pemerintah bertindak tegas menangkap provokatornya. Dari berbagai kerusakan, teror, fitnah dan pembunuhan memang sedang melanda bangsa kita sehingga untuk menghadapi berbagai bencana tersebut, maka semua pihak hendaknya senantiasa waspada. Sebab, berbagai cara akan dilakukan oleh provokator untuk mengadu domba antarumat beragama, antarsuku dan antaretnis sehingga persatuan dan kesatuan menjadi rapuh.¹³ Oleh karena itu, setiap umat beragama senantiasa berpegang teguh pada ajaran agamanya, agar mereka tidak akan terjebak pada isu-isu yang melayang.

Konflik antarumat beragama yang berkepanjangan kalau terus dibiarkan akan menjadi petaka yang cukup besar yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa sudah dekat dihadapan mata, manakala konflik antarumat beragama tidak segera diatasi. Padahal para tokoh pendiri bangsa ini awal kemerdekaan bisa menjadikan perbedaan agama sebagai perekat tali persatuan bangsa. Simbol Negara Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yakni komitmen menjalin keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Munculnya konflik antarumat beragama karena berbagai aspek, seperti ada kecurigaan

antar pemeluk agama yang satu terhadap pemeluk agama yang lain. Selain itu ada juga permainan politik kotor yang ingin mengadu domba umat beragama untuk kepentingan politik tertentu. Kecurigaan antara pemeluk agama yang sudah terpendam lama begitu mudah dimanfaatkan oleh politikus yang tidak bermoral untuk membuat konflik berkepanjangan. Rakyat yang awam pada permainan politik akhirnya hanya menanggung korban, baik harta maupun jiwa.

Selama ini konflik-konflik yang terjadi antarumat beragama, bisa jadi disebabkan oleh faktor ketidakadilan. Di antaranya dalam hal kesenjangan ekonomi antarpenganut agama. Hal itu juga tampak dalam perlakuan politik berdasarkan agama yang dianut, terutama di masa rezim Orde Baru, di mana demi memperoleh dukungan politik, rezim itu memberikan posisi-posisi strategis kepada elite-elite dari agama tertentu. Perlakuan kurang adil itu bisa memancing kecemburuan dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Apalagi antara umat beragama kurang intens mengadakan dialog agama, perlakuan tak adil demikian tambah membuka peluang terjadinya konflik. Ini terjadi karena masalah agama adalah sangat sensitif bagi para pemeluknya. Sedikit saja ada gesekan, bisa membuat penganutnya terkena emosi. Dan karena alasan fanatisme, hal itu dapat membuat tindakan mereka sulit dikontrol.¹⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antarumat beragama karena kurangnya untuk saling memahami dan menghargai agama lain serta umat beragama lain sehingga dalam kehidupan umat beragama tidak adanya saling menghargai hakikat dan martabat manusia di mana nilai-nilai kemanusiaan yang universal tidak berlaku lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis antarumat beragama tersebut, terutama hati nurani dan cinta kasih bagi *kerukunan, toleransi dan persatuan dalam kemajemukan* umat beragama.

Konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, melainkan oleh yang lainnya, seperti faktor ekonomi, politik, maupun sosial. Konflik ini tidak jarang terjadi karena persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran agama yang tidak se-

¹³ *Ibid*, hlm. 138

¹⁴ Diakses, di <http://suaramerdekwacana.com> pada tanggal 15 Agustus 2016

suai dengan ketentuan yang berlaku. Atau karena adanya salah paham di antara pemeluk agama. Konflik internal umat beragama terjadi karena adanya pemahaman yang menganggap hanya aliran sendiri yang benar dan menyalahkan yang lain, pemahaman yang diselewengkan atau pemahaman yang bebas semau sendiri tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pluralisme melahirkan karakter apatis dan puritan terhadap toleransi beragama.¹⁵

Dalam rangka itu, saya mencoba mencari dan berusaha menggali akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik "SARA" di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ditingkat domestik dan lokal, ada masalah serius yang dirasakan masyarakat sebagai ketidak-adilan. Pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Sudah menjadi realitas bahwa ekonomi dikuasai etnik Tionghoa (Cina). Mereka makin lama semakin kaya karena aparat dan kepala daerah bekerja sama dengan mereka. Ini terjadi karena dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka terlibat menjadi cukong kepada setiap calon yang bertarung dalam pilkada, sehingga siapapun yang menang dalam pilkada, mereka sudah investasi terlebih dahulu sebagai penyandang dana dan kepala daerah yang terpilih otomatis merasa berhutang budi kepada mereka. Dampaknya, kepala daerah bekerjasama dengan mereka. Kondisi semacam itu, menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar dan masyarakat kemudian marah, benci dan anti terhadap mereka yang kebetulan dari etnik Cina (Tionghoa). Kedua, tumbuh arogansi di kalangan mereka terhadap masyarakat pribumi. Ini penyakit orang kaya yang dilindungi oleh aparat. Mereka tidak lagi sensitive - menyaring kata dan kalimat kalau berbicara, sehingga masyarakat memendam kebencian dan kemarahan terhadap mereka. Kasus Ibu Herlina, yang marah dan menegur muazzin (orang yang azan dalam rangka memanggil untuk shalat) dengan menggunakan pengeras suara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, segera direspon dengan melampiaskan kemarahan dan kebencian yang sudah lama dipendam dengan membakar Vihara dan Kelen-teng yang menjadi tempat beribadah orang-

orang Cina (Tionghoa). Ketiga, persepsi masyarakat terhadap mereka menjadi sangat negatif karena setiap terjadi masalah, aparat selalu memihak kepada mereka. Kondisi semacam ini menyebabkan muncul teroris dan aparat menjadi target untuk melampiaskan kemarahan, kebencian dan dendam. Keempat, kebijakan dan perlakuan yang mengistimewakan mereka yang kaya, yang kebetulan adalah etnik Cina (Tionghoa), telah memancing perasaan tidak adil yang sewaktu-waktu diledakkan jika ada masalah sekecil apapun. Kelima, faktor global turut mempengaruhi masyarakat berperilaku temperamental, cepat marah dan emosi. Penyebab Mudah Konflik Selain lima faktor yang dikemukakan di atas, penyebab mudahnya meledak konflik, karena masyarakat membentuk klaster, kumpulan, dan kelompok berdasarkan agama, suku, etnik, pekerjaan, dan sebagainya. Disamping itu, masyarakat yang difasilitasi pemodal membangun tempat tinggal berdasarkan stratifikasi sosial ekonomi. Mereka yang kaya tinggal di kawasan yang eksklusif, sementara mereka yang miskin tinggal di kawasan yang padat dan kumuh. Juga dalam rangka pembangunan dan penataan kota, mereka yang miskin digusur dan ditenpatkan di rumah susun sewa (rusunawa). Mereka difasilitasi untuk membentuk klaster berdasarkan stratifikasi sosial ekonomi sebagai kelompok miskin seperti halnya orang-orang kaya, hanya bedanya mereka difasilitasi oleh pemodal. Kondisi demikian semakin parah dan mudah meledak menjadi konflik karena tidak ada wadah yang bisa menjembatani antara satu kelompok dengan kelompok lain. Wadah dialog dan wadah komunikasi tidak ada. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) misalnya merupakan satu forum yang dibentuk untuk menjembatani para umat beragama, tetapi belum mampu menjangkau kelompok-kelompok yang dibangun berdasarkan stratifikasi sosial ekonomi, sehingga perlu dipikirkan adanya wadah lain.

B. Penanggulangan konflik antar umat beragama di Indonesia

Semua agama di dunia mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling mengasihi dan menghormati pemeluk agama lain. Namun realita yang terjadi dalam sejarah umat manusia, agama sering dijadikan dalih untuk membantai

¹⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 174

pemeluk agama yang lain. Masih segar di dalam ingatan kita betapa berdarah-darahnya saudara-saudara kita bertikai atas nama agama, seperti di Ambon dan Poso. Semua konflik ini terjadi karena fanatisme sempit, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain.

Kenyataan bahwa unsur-unsur keagamaan dijadikan sebagai pemicu serentak sasaran konflik, baik pada tingkat lokal dan nasional maupun internasional akhir-akhir ini, tentu memprihatinkan dan mencemaskan banyak orang, terutama bagi kita bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Maluku khususnya, yang berciri majemuk, persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, perdamaian dan ketenteraman serta kebersamaan, persekutuan dan kerjasama akan terancam, terganggu dan merosot. Timbul kecemasan akan konflik, kekerasan, perpecahan dan kehancuran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Cukup banyak orang cemas akan ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, atau akan terjadinya disintegrasi bangsa, yang dipicu dengan isu agama.

Karena itu, untuk mencapai kerukunan beragama yang harmonis, kiranya dialog antarumat beragama perlu diadakan secara intensif agar tercipta saling pengertian antarkomunitas agama. Saling pengertian itu akan memungkinkan antar kelompok saling menghormati. Keadaan itu pada gilirannya akan menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleran serta memantapkan kerukunan antarumat beragama.

Dialog antaragama itu hanya bisa dimulai bila ada keterbukaan sebuah agama terhadap agama lainnya. Persoalannya mungkin baru muncul bila kemudian mulai dipersoalkan secara terperinci apa yang dimaksud keterbukaan itu, segi-segi mana dari suatu agama yang memungkinkan dirinya terbuka terhadap agama lain, pada tingkat mana keterbukaan itu dapat dilaksanakan. Lalu, dalam modus bagaimana keterbukaan itu bisa dilakukan.¹⁶

Barangkali penyelesaian konflik antarumat Beragama harus dimulai dengan menghilangkan rasa saling curiga dan dendam antarsesama. Kalau kecurigaan dan dendam bisa dihilangkan barulah melangkah pada dialog yang efektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

Dialog tersebut sesungguhnya bukan lagi terbatas pada tokoh-tokoh agama, namun lapisan masyarakat bawah. Tokoh-tokoh agama sesungguhnya sudah sejak lama menjalin dialog agama, namun belum teraktualisasikan pada lapisan bawah. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, wibawa tokoh-tokoh agama tampaknya sudah semakin berkurang dihadapan umatnya. Ini bisa dilihat dengan adanya keengganan umat mengikuti himbauan tokoh-tokoh agama. tatkala terjadi konflik, tokoh-tokoh agama sudah mengimbau umatnya masing-masing untuk rukun namun kenyataannya konflik terus berkepanjangan.¹⁷

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama, sinkretisme*, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua, reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga, sintesis*, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Keempat, penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima, agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.¹⁸

Untuk mencegah terulangnya kasus Tanjung Balai, Sumatera Utara, maka masyarakat Indonesia yang terpecah akibat segregasi sosial ekonomi, tempat tinggal, agama, suku, etnik, pekerjaan, harus ada upaya keras, pertama, mengatasi dan memecahkan akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kalau permasa-

¹⁷ Hamdan Daulay, *Op. Cit.*, hlm. 140

¹⁸ A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, INIS, Jakarta, 1992, hlm. 227-229.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 177-179

lahan kesenjangan sosial ekonomi, diatasi dengan suatu kebijakan yang memberi *special treatment* dan *affirmative action* terhadap mereka yang lemah terutama kaum pribumi. Malaysia sebagai contoh, melalui *New Economic Policy (NEP)* telah sukses memperkecil kesenjangan sosial ekonom antara etnik Melayu dan Cina. Kedua, diperlukan wadah sebagai forum dialog dan komunikasi antar kelompok yang berbeda stratifikasi sosial ekonomi, tempat tinggal, etnik, suku dan sebagainya, sehingga kalau timbul masalah, bisa didialogkan dan dicarikan solusinya. Ketiga, untuk mengakhiri ketegangan sosial akibat kesenjangan sosial ekonomi antara etnik Tionghoa dengan kaum pribumi, pemerintah sangat penting memberi prioritas pada pendidikan bagi kaum miskin dengan memberi beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri. Program memajukan kaum pribumi secara konsisten dan berkesinambungan yang mayoritas masih lemah dalam bidang pendidikan dan ekonomi mutlak dilakukan sebagai solusi jangka panjang. Keempat, fokus dan memberi skala prioritas untuk mencegah terulangnya konflik "SARA" tidak hanya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tetapi juga di daerah lain seperti di DKI Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia dengan memecahkan akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya konflik "SARA".

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Perlindungan hu-

kum terhadap kelompok minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia, penyebab mudahnya meledak konflik, karena masyarakat membentuk klaster, kumpulan, dan kelompok berdasarkan agama, suku, etnik, pekerjaan, dan sebagainya. Disamping itu, masyarakat yang difasilitasi pemodal membangun tempat tinggal berdasarkan stratifikasi sosial ekonomi. Mereka yang kaya tinggal di kawasan yang *exclusive*, sementara mereka yang miskin tinggal di kawasan yang padat dan kumuh. Juga dalam rangka pembangunan dan penataan kota, mereka yang miskin digusur dan ditenpatkan di rumah susun sewa (*rusunawa*). Mereka difasilitasi untuk membentuk klaster berdasarkan stratifikasi sosial ekonomi sebagai kelompok miskin seperti halnya orang-orang kaya, hanya bedanya mereka difasilitasi oleh pemodal. Kondisi demikian semakin parah dan mudah meledak menjadi konflik karena tidak ada wadah yang bisa menjembatani antara satu kelompok dengan kelompok lain. Wadah dialog dan wadah komunikasi tidak ada. Penanggulangan konflik antar umat beragama di Indonesia,

Adalah dengan dibentuknya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) misalnya merupakan satu forum yang dibentuk untuk menjembatani para umat beragama, tetapi belum mampu menjangkau kelompok-kelompok yang dibangun berdasarkan stratifikasi sosial ekonomi, sehingga perlu dipikirkan adanya wadah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, INIS, Jakarta, 1992.
Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1999.
Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-agama*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.
Hamdan Daulay, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, Lesti, Yogyakarta, 2001.

- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan)*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Internet:

<http://suaramerdekawacana.com>, diakses, pada tanggal 15 Agustus 2016

Membedah Akar Masalah Konflik “SARA” di Tanjung Balai Sumatera Utara, http://www.kompasiana.com/musniumar/membedah-akar-masalah-konflik-sara-di-tanjung-balai-sumatera-utara_579e716ed47a61b11ffef310.